

Analisis Komparasi Laporan Piutang Pendidikan Universitas Negeri Semarang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19

Nurchayati¹, Silvi Pratiwi², Eni Kristianingsih³, Kiswanto⁴

¹Universitas Negeri Semarang- cahya83@mail.unnes.ac.id

Abstrak-Universitas Negeri Semarang merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma kurang lebih 48.000 orang. Pendapatan UNNES yang terbesar berasal dari pendapatan jasa layanan pendidikan yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT merupakan biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa setiap awal semester. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 yang terbit pada saat terjadinya pandemi Covid 19, memberikan kebijakan bagi perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan kebijakan keringanan pembayaran UKT antara lain, pembayaran 50% UKT, penurunan UKT, pengurangan UKT, dan pembayaran UKT dengan mengangsur. Dengan terbitnya peraturan tersebut, UNNES menerapkan kebijakan pembayaran UKT dengan mengangsur yang berdampak pada catatan piutang pendidikan UNNES. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah piutang pendidikan setelah adanya pandemi Covid 19. Berdasarkan tabel Paired Samples Test, diperoleh $Sign = 0.000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi rata-rata kedua sampel berbeda, sehingga dengan menerima H_1 artinya terdapat perbedaan antara total data sebelum Covid dan sesudah Covid 19. Hasil lain dari penelitian ini adalah penatausahaan piutang pendidikan UNNES sudah sesuai dengan pedoman akuntansi pengelolaan piutang di UNNES.

Kata Kunci : Piutang pendidikan, angsuran, Uang Kuliah Tunggal (UKT)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah atas yang terdiri dari program diploma, sarjana, magister, doktor, program spesialis, dan program profesi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi berfungsi untuk mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, dan berdaya saing, serta kooperatif melalui pelaksanaan program tridharma, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu didukung oleh biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut mengatur biaya yang harus ditanggung oleh tiap mahasiswa yang berasaskan keadilan, sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Universitas Negeri Semarang merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma kurang lebih 48.000 orang. Pendapatan UNNES yang terbesar berasal dari pendapatan jasa layanan pendidikan yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurut Affan (2021), pendapatan UKT merupakan sumber pendapatan yang penting bagi perguruan tinggi dalam rangka membiayai operasional perguruan tinggi.

UKT merupakan biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa setiap awal semester. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 yang terbit pada saat terjadinya pandemi Covid 19, memberikan kebijakan bagi perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan kebijakan keringanan pembayaran UKT antara lain, pembayaran 50% UKT, penurunan UKT, pengurangan UKT, dan pembayaran UKT dengan mengangsur. Dengan terbitnya peraturan tersebut, UNNES menerapkan kebijakan pembayaran UKT dengan mengangsur yang berdampak pada catatan piutang pendidikan UNNES.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang UKT merupakan piutang terbesar dari suatu perguruan tinggi negeri karena perguruan tinggi adalah organisasi yang “menjual jasa pendidikan” kepada mahasiswa sebagai konsumen atau pelanggannya. Namun, seharusnya piutang ini tidak tersimpan terlalu lama sehingga jumlahnya semakin meningkat dan tidak terjadi penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu. Selain masalah likuiditas, kondisi ini juga menimbulkan masalah dalam hal penagihan karena mahasiswa yang sudah lulus tentu akan meninggalkan kampus dan tidak selalu dapat dihubungi. Hal ini akan menurunkan kinerja (Hastuti, 2021).

Adanya piutang pendidikan di UNNES dikarenakan pembayaran UKT yang dilakukan secara mengangsur sesuai dengan surat pernyataan yang diajukan oleh mahasiswa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 dijelaskan bahwa piutang negara harus dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga mengelola piutang negara dan daerah melalui tahapan penatausahaan, penagihan, penanganan, pengurusan, pengecekan, pengendalian, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan piutang tersebut harus diserahkan kepada PUPN untuk proses penagihan sesuai ketentuan yang berlaku apabila satker tidak berhasil menyelesaikan piutang yaitu piutang yang macet (Putri, 2021).

Adanya kebijakan pembayaran UKT secara mengangsur berdampak pada laporan piutang pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi laporan piutang pendidikan UNNES sebelum dan sesudah Pandemi Covid 19 yaitu mulai tahun 2019 s.d 2022, serta memberikan gambaran penatausahaan piutang di Universitas Negeri Semarang.

2. METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data laporan piutang pendidikan UNNES pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelusuri data historis yang berbentuk dokumentasi yang menggambarkan peristiwa di masa lalu.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan dengan asumsi bahwa data variabel penelitian yang akan di analisis berdistribusi normal dan homogen. Apabila data berdistribusi tidak normal maka menggunakan statistik nonparametrik. Uji hipotesis menggunakan t-tes. Uji-t adalah statistik inferensial yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok dan bagaimana keterkaitannya.

**Tabel 1 Data Piutang Pendidikan (UKT)
Universitas Negeri Semarang Tahun 2019-2020**

No	Fakultas	2019	2020
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	31.150.000	28.150.000
2	Fakultas Bahasa dan Seni	84.035.000	72.035.000
3	Fakultas Ilmu Sosial	62.250.000	62.250.000
4	Fakultas Matematika dan IPA	36.250.000	33.000.000
5	Fakultas Teknik	75.650.000	65.450.000
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan	106.100.000	106.100.000
7	Fakultas Ekonomi	80.000.000	74.300.000
8	Fakultas Hukum	73.475.000	66.700.000
JUMLAH		548.910.000	507.985.000

Sumber: Data sekunder yang diolah

**Tabel 2 Data Piutang Pendidikan (UKT)
Universitas Negeri Semarang Tahun 2021 -2022**

No	Fakultas	2021	2022
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	55.545.000	97.998.000
2	Fakultas Bahasa dan Seni	145.150.000	185.993.845
3	Fakultas Ilmu Sosial	107.562.500	124.892.500
4	Fakultas Matematika dan IPA	117.100.000	152.350.000
5	Fakultas Teknik	99.920.000	154.790.000
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan	141.860.000	159.615.000
7	Fakultas Ekonomi	115.630.000	141.950.000
8	Fakultas Hukum	81.450.000	116.885.000
JUMLAH		864.217.500	1.134.474.345

Sumber: Data sekunder yang diolah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbedaan Laporan Piutang Pendidikan Universitas Negeri Semarang Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19

Analisis komparasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan laporan piutang pendidikan di Universitas Negeri Semarang sebelum dan sesuai Pandemi Covid 19, Dimana pada saat itu diterapkan kebijakan pembayaran UKT secara mengangsur. Hasil olah data dengan menggunakan SPSS dapat dilihat dibawah ini.

1. Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Sebelum Covid	Setelah Covid
N		8	8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	132111875.00	249836480.63
	Std. Deviation	49189630.000	56026499.338
	Absolute	.190	.160
Most Extreme Differences	Positive	.188	.113
	Negative	-.190	-.160
Kolmogorov-Smirnov Z		.538	.452
Asymp. Sig. (2-tailed)		.935	.987

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

H_0 : Data berdistribusi normal, H_1 : Data tidak berdistribusi normal. Taraf Signifikan : $\alpha = 5\% = 0,05$. Statistik Uji Menggunakan nilai dari *Sig.* (2 – tailed), Kriteria Uji: Jika *Sig.* > 0,05 maka H_0 diterima.

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui nilai *Asymp Sig.* (2 – tailed) pada data piutang pendidikan Sebelum Covid 19 adalah 0,935 > 0,05 maka H_0 diterima. Lalu pada data piutang pendidikan setelah Covid 19 adalah 0,967 > 0,05 maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data piutang pendidikan Sebelum dan Sesudah Covid 19 memiliki distribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Tabel 4
Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variance					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Data_Covid	Based on Mean	.112	1	14	.743
	Based on Median	.124	1	14	.730
	Based on Median and with adjusted df	.124	1	13.950	.730
	Based on trimmed mean	.099	1	14	.758

H_0 : Kedua varians homogen H_1 : Kedua varians tidak homogen. Taraf Signifikan : $\alpha = 5\% = 0,05$. Statistik Uji Menggunakan nilai dari *Sig.* (2 – tailed). Kriteria Uji Jika *Sig.* > 0,05 maka H_0 diterima.

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai *Sig* adalah $0,743 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa varian dari dua sampel tersebut sama atau homogen.

3. Uji T sampel berpasangan

Uji T sampel berpasangan dilakukan dengan menggunakan SPSS yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan laporan piutang pendidikan di Universitas Negeri Semarang sebelum dan sesuai Pandemi Covid 19. Hasil uji T tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Hasil Uji T

Paired Samples Test									
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum_Covid - Setelah_Covid	-11772460.5625	46783.476.701	16540456.811	-156836570.934	-78612640.316	-7.117	7	.000

Berdasarkan tabel 5 di atas, diperoleh *Sig.* = $0.000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi rata-rata kedua sampel berbeda, sehingga dengan menerima H_1 artinya terdapat perbedaan antara piutang pendidikan sebelum Covid 19 dan sesudah Covid 19.

Penatausahaan Piutang Pendidikan di Universitas Negeri Semarang

Penatausahaan piutang Universitas Negeri Semarang dilakukan berdasarkan pada pedoman akuntansi piutang yang berlaku di Universitas Negeri Semarang. Pedoman Akuntansi Piutang memberikan panduan yang seragam bagi pejabat perbendaharaan dan petugas pelaporan Keuangan pada satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan, pencatatan dan penyajian piutang yang wajar dalam Laporan Keuangan dan mendukung penyelenggaraan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menghasilkan informasi piutang yang wajar. Analisis ini dilakukan untuk menggali informasi sejauh mana implementasi pedoman akuntansi piutang di Universitas Negeri Semarang.

1) Kesesuaian implementasi Pedoman Akuntansi dalam pengakuan Piutang Pendidikan di UNNES

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, dan atau timbulnya tagihan/klaim Universitas Negeri Semarang kepada pihak ketiga tetapi belum menerima pembayaran, piutang berkurang pada saat dilakukan penerimaan pembayaran piutang atau dihapuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pedoman Akuntansi dalam pengakuan Piutang Pendidikan di UNNES sudah sesuai.

2) Kesesuaian implementasi Pedoman Akuntansi dalam Pengukuran Piutang Pendidikan di UNNES

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Piutang dicatat sebesar nilai yang belum diterima pembayarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi Pedoman Akuntansi dalam Pengukuran Piutang Pendidikan di UNNES telah sesuai.

3) Kesesuaian implementasi Pedoman Akuntansi dalam Pencatatan Piutang Pendidikan di UNNES

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Piutang disajikan sebagai berikut: Piutang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca dan disajikan sebesar nilai bersihnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi: 1) rincian jenis dan jumlah piutang, 2) kebijakan penentuan Cadangan kerugian piutang, 3) kebijakan penghapusan piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pedoman Akuntansi dalam Pencatatan Piutang Pendidikan di UNNES telah sesuai.

4) Kesesuaian implementasi Pedoman Akuntansi dalam klasifikasi kualitas Piutang Pendidikan di UNNES

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, klasifikasi kualitas Piutang Pendidikan terdiri dari piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan, dan piutang macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pedoman Akuntansi dalam Penyisihan Piutang Pendidikan di UNNES sudah sesuai.

5) Kesesuaian implementasi Pedoman Akuntansi dalam Penghapusan Piutang Pendidikan di UNNES

Implementasi Pedoman Akuntansi dalam Penghapusan Piutang Pendidikan di UNNES mengikuti tata cara yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan. Namun implementasi Pedoman Akuntansi dalam Penghapusan Piutang Pendidikan di UNNES belum dilaksanakan, belum dilakukan penghapusan piutang Pendidikan, namun telah dilakukan pengurusan piutang ke PUPN/ diserahkan ke PUPN.

6) Kesesuaian implementasi Pedoman Akuntansi dalam Pelaporan Piutang Pendidikan di UNNES.

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, penyajian Piutang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca dan disajikan sebesar nilai bersihnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi: 1) rincian jenis dan jumlah piutang, 2) kebijakan penentuan Cadangan kerugian piutang, 3) kebijakan penghapusan piutang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan antara piutang pendidikan Universitas Negeri Semarang sebelum Covid 19 dan sesudah Covid 19.
2. Implementasi Penatausahaan piutang pendidikan di Universitas Negeri Semarang sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Piutang Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fahri. 2018. Analisis Manajemen Arus Kas Terkait Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Dan Biaya Kuliah Tunggal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Di Sulawesi Selatan. Jurnal Ekspose Volume 17, Nomor 2, Juli – Desember 2018 P-ISSN: 1412-2715, E-ISSN: 2616-4412.
- Affan, Nurita. 2021. Audit Manajemen atas Piutang dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan. AKUNTABEL 18 (2), 2021 346-352. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>.
- Dewi, H.P. 2015. Sistem Pengendalian Interen Atas Piutang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp) Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pada Yayasan Islam Al - Hamidiyah Depok Tangerang. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Unisnu Jepara Vol. 12 No. 1 Maret 2015.
- Hastuti. 2021. Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Perguruan Tinggi Negeri (Suatu Studi Kasus). Jurnal Riset Akuntansi/Vol 13/No 1/April 2021.
- Hastuti, Burhany, D.I., Rufaedah, Y., Mai, M.U., Rochendi, H. 2021. Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Perguruan Tinggi Negeri (Suatu Studi Kasus). Jurnal Riset Akuntansi/Vol 13/No 1/April 2021. Politeknik Negeri Bandung.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 Tentang Penghapusan Piutang
- Permana, R.D. 2014. Evaluasi Manajemen Piutang Mahasiswa Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus Pada Universitas X). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Putri, PA., Siregar, S. 2023. Analisis Pengelolaan Piutang Negara di Masa Pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) E-ISSN: 2774-2075 Vol. 3 No.1, Year [2023] Page 315-323.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.